

Community Based Tourism dalam Pengembangan Wisata Maritim di Aceh Selatan

Cut Asmaul Husna¹, Ikhsan², Vellayati Hajad³

^{1,2,3} Universitas Teuku Umar

Corresponding Author: cutasmaulhusna@utu.ac.id

Received 12 October 2023 ☐ Revised 05 Desember 2023 ☐ Accepted 21 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengembangan *community based tourism* dalam wisata Pulau Dua di Kabupaten Aceh Selatan. Wisata maritim menjadi bidang wisata unggulan dalam memperkuat perekonomian Aceh Selatan karena mampu meningkatkan pendapatan daerah, membuka banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar lokasi wisata, sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Persoalan yang dihadapi oleh daerah saat ini adalah terkait jumlah kunjungan dan keterserapan angkatan kerja, akibatnya terdapat 2.330 penduduk miskin Aceh Selatan di tengah banyaknya potensi wisata maritim yang seharusnya mampu menghadirkan diversifikasi pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan masyarakat di sekitar objek wisata Pulau Dua Kabupaten Aceh Selatan sebagai sumber informan. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam bersama narasumber. Hasil penelitian ini adalah terdapat peran sentral masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan wisata maritim dengan fokus utama keterlibatan masyarakat sesuai dengan arah kebijakan wisata maritim di Kabupaten Aceh Selatan. Kesimpulan yang dihasilkan adalah masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan wisata maritim Pulau Dua yaitu: penambahan sarana dan prasarana, penambahan sumber daya manusia, dan peningkatan anggaran operasional melalui kerja sama.

Kata kunci: wisata maritim, ekonomi masyarakat, pengembangan, community based tourism

ABSTRACT

The purpose of this study is to ascertain how community-based tourism development is being implemented in South Aceh Regency's Pulau Dua tourism. Due to its capacity to raise regional revenue, create numerous job opportunities, raise the standard of living for those who live close to tourist attractions, and serve as a source of Regional Original revenue (PAD), maritime tourism is a key component of South Aceh's tourism industry. There are 2,330 poor citizens of South Aceh despite the region's significant maritime tourism potential, which should be able to diversify job opportunities due to the problem the area is now experiencing with the number of visitors and labor absorption. The community surrounding the Pulau Dua tourist destination in South Aceh Regency served as a source of informants for the qualitative case study approach used in the research. In-depth interviews with resource people and observation were used to gather research data. According to the findings of this study, the community and regional government play a crucial role in the development of marine tourism, with a particular emphasis on community involvement in line with the direction of maritime tourism policy in South Aceh Regency. The ensuing conclusion is that there are still a number of obstacles to overcome in order to grow Pulau Dua marine tourism, including the addition of facilities and infrastructure, the addition of human resources, and the cooperative increase of the operational budget.

Key words: maritime tourism, community economy, development, and community-based tourism.

PENDAHULUAN

Penelitian ini berbicara mengenai implementasi kebijakan wisata maritim di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini mengambil posisi berbeda dengan mayoritas penelitian tentang wisata yang fokus pada strategi pengembangan wisata dilakukan oleh banyak daerah (Ferdinan, Makmur and Ribawanto, 2015; Lugra et al., 2016; Ihsan, Mubarak and Mulyadin, 2021), peningkatan pendapatan masyarakat (Pynanjung, 2018; Marjulita, 2019; Mulyana, 2019; Meutia and Rizal, 2022), dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah (Pertiwi, 2013; Pradikta, 2013; Yanti and Hadya, 2018). Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan wisata maritim dalam pengembangan *community based tourism*.

Wisata menjadi bidang wisata unggulan dalam memperkuat perekonomian daerah, mampu meningkatkan pendapatan daerah, dan dapat membuka banyak lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar tempat wisata (Aji, 2018). Secara teoritis konsep "tourism" membuka ruang untuk melibatkan banyak aktor dalam proses pengelolaan dan pengembangannya. Sehingga, Pemerintah Indonesia mengatur regulasinya dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Pasal 1 yang mendefinisikan pariwisata sebagai bermacam kegiatan kepariwisataan yang dilengkapi dengan pelbagai akomodasi dan jasa yang disiapkan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah dalam pengembangan pariwisata penting karena memiliki otoritas untuk mengatur, menyediakan, dan mendistribusikan bermacam fasilitas terkait dengan keperluan wisata termasuk dalam pengembangan wisata maritim (Hendrita, 2017).

Wisata maritim mempunyai makna yang sama dengan wisata atau tourism pada umumnya yaitu perpindahan seseorang dari tempat tinggalnya ke tempat baru dengan tujuan wisata dengan maksud untuk menikmati perjalanan itu dengan berbagai alasan, seperti bersenang-senang atau beristirahat dalam kurun waktu tidak lebih dari satu tahun (Anismar, Satria and Ali, 2018; Suot, Kawung and Tumilaar, 2021). Namun, dengan penekanan pada objek wisata pantai, laut, dan pulau (maritim) sebagai tujuan destinasi wisata yang dilakukan seperti yang sedang dikembangkan oleh Kabupaten Aceh Selatan saat ini, di mana fokus pengembangan wisata yang dijalankan adalah wisata maritime. Hal tersebut dapat dilihat dari 35 destinasi wisata unggulan Kabupaten Aceh Selatan maka 80% nya merupakan wisata maritim atau berbasis pantai dan laut.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa setelah pandemi Covid-19 berakhir, pertumbuhan ekonomi nasional yang lesu, dan angka kemiskinan ekstrem yang terjadi membuat banyak daerah dengan potensi wisata berbenah terutama dalam melakukan branding dan promosi wisata. Dinas Pariwisata Aceh Selatan mengatakan jumlah kunjungan wisata di Aceh Selatan (Januari-Juni 2023) meningkat pesat mencapai 25 ribu orang (Agus, 2023) akibat promosi dan branding yang mereka lakukan di berbagai media massa, termasuk di dalamnya lewat keikutsertaan destinasi wisata maritim Aceh Selatan dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia (API) yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia di tahun 2021 dan 2022.

Permasalahan yang terjadi dalam pengembangan wisata di Kabupaten Aceh Selatan adalah jumlah kunjungan ini tidak sebanding dengan angka keterserapan pekerjaan dari masyarakat di mana jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Selatan masih cukup tinggi yaitu terdapat 2.330 penduduk miskin padahal potensi wisata mampu menghadirkan diversifikasi pekerjaan lainnya seperti banyak usaha mikro, kecil, dan menengah yang terbentuk, misalnya yang menjual makanan dan minuman, toko suvenir, pemandu wisata, usaha penginapan, transportasi, dan lainnya. Kondisi ini sudah diduga oleh banyak peneliti sebelumnya akibat peran pemerintah daerah yang dominan dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata karena merasa menjadi pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengatur pembangunan di tiap wilayah yang dikelolanya, sehingga tanpa sadar meminggirkan peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan wisata maritim di Kabupaten Aceh Selatan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata maritim yang sering disebut sebagai *community based tourism* melalui pemberdayaan masyarakat lokal yaitu dengan menjadikan masyarakat sebagai aktor sentral dalam dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemberian suara berupa keputusan dalam pembangunannya. Sehingga, destinasi wisata yang sedang dikembangkan menjadi mandiri secara sosial dan ekonomi (Wibawanti, 2020). Kebijakan tentang wisata maritim di Kabupaten Aceh Selatan adalah turunan langsung Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata di Pasal 6 yang menyebutkan jika Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan, memfasilitasi, melakukan promosi, pembuatan produk wisata, dan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan wisata maritim.

Kabupaten Aceh Selatan memiliki banyak objek wisata yang tersebar di 18 kecamatan yang ada di wilayahnya. Bahkan, pada tahun 2022 Kabupaten Aceh Selatan tercatat memiliki sebanyak 111 objek wisata alam dan maritim, dan beberapa objek wisata maritim yang terkenal di Kabupaten Aceh Selatan adalah wisata Pulau Dua di Kecamatan Bakongan Timur, Pantai SBB di Kecamatan Labuhanhaji, Pantai Air Dingin di Kecamatan Sawang, dan Pantai Lhokrukam di Kecamatan Tapaktuan. Kehadiran objek wisata ini mempunyai kontribusi dan peran yang cukup besar bagi masyarakat setempat, seperti menciptakan lapangan kerja dan memberikan dampak multiplier bagi pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan seperti meningkatkan produksi daerah, melakukan operasi perdagangan, dan lain sebagainya (Meutia and Rizal, 2022).

METODE

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan sebagai pedoman untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yaitu implementasi kebijakan wisata maritim dalam pengembangan *community based tourism* di Kabupaten Aceh Selatan (Cresswell, 2014). Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini dengan pada kata kunci implementasi kebijakan wisata maritim dalam pengembangan *community based tourism*. Beberapa artikel terkait dikumpulkan, direview, kemudian ditemukan kebaruan (*novelty*). Narasumber dalam penelitian ini ditentukan dengan cara teknik *purposive sampling* untuk menetapkan siapa yang berhak untuk menjadi narasumber penelitian. Adapun individu yang akan bertindak sebagai narasumber berjumlah sepuluh orang yang terdiri dari masyarakat, pelaku usaha wisata, dan pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Selatan.

Pendekatan studi kasus yang diadopsi dalam penelitian ini. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan wawancara di lokasi penelitian untuk mengidentifikasi: sosial aset yang dimiliki oleh komunitas tersebut, seperti budaya, adat-istiadat, sosial network, dan gaya hidup. Selain itu observasi dan wawancara juga bertujuan untuk menemukan data terkait sarana dan prasarana, organisasi, aktivitas ekonomi, dan proses pembelajaran. Selain data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, data penelitian sekunder juga didapatkan melalui dokumentasi yang bersumber dari jurnal, buku, dan dokumen resmi pemerintah seperti undang-undang, qanun, perbub, dan lainnya. Analisa data dalam pendekatan studi kasus dilaksanakan dengan mengatur data yang sudah diperoleh di lapangan dengan cara di-*display* dalam bentuk transkrip wawancara, dikategorisasikan, di-kodekan sesuai tema yang ditemukan dalam transkrip wawancara, dan kemudian diinterpretasi sehingga menghasilkan kesimpulan dari penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian studi kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi penyidik (pengecekan sejawat), dan uraian rinci. Mengenai pengecekan sejawat, teknik ini dilaksanakan oleh peneliti dengan cara mempresentasikan data dan mendiskusikannya dengan rekan-rekan dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara. Nilai keabsahan data penelitian ini tidak dibangun dengan teknik triangulasi, karena pengumpulan dan pengujian data skripsi mahasiswa Prodi Sendratasik telah kuat secara ilmiah dari sisi materialnya.

HASIL DAN DISKUSI

Menempatkan Penelitian dalam Peta Kajian

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berbicara mengenai wisata sebagai sebuah definisi (Asy'ari et al., 2021) dan melihat kegiatan wisata sebagai aktivitas manusia yang berlangsung di luar lingkungan asalnya untuk tujuan berlibur, berdagang, atau kegiatan bisnis lainnya. Kegiatan wisata dipandang sebagai mesin ekonomi yang banyak digunakan oleh negara dunia untuk pertukaran barang dan jasa melalui pertukaran barang lokasi wisata dan pengunjung melalui buah tangan, souvenir, dan lainnya (Ferdinan, Makmur and Ribawanto, 2015). Sehingga, pengembangan wisata mampu berdampak terhadap pendapatan masyarakat (Pynanjung, 2018; Marjulita, 2019; Mulyana, 2019; Meutia and Rizal, 2022), atau terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pertiwi, 2013; Pradikta, 2013; Yanti and Hadya, 2018).

Selain itu, penelitian tentang pengembangan wisata juga berbicara tentang bagaimana pengembangan wisata dilakukan oleh banyak daerah (Ferdinan, Makmur and Ribawanto, 2015; Luga et al., 2016; Ihsan, Mubarak and Mulyadin, 2021) yaitu pengembangan pariwisata melalui perencanaan dan pengendalian yang baik dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia (Yatmaja, 2019), kesejahteraan masyarakat karena pariwisata membuka prospek ekonomi dan lapangan kerja, serta membantu melestarikan dan melindungi kekayaan alam dan hayati (Yulianti et al., 2019), dan pengembangan wisata yang diarahkan agar dapat digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini sekaligus untuk kebutuhan generasi yang akan datang (keberlanjutan) (Haryanto, 2014; Junaid, 2020).

Penelitian terdahulu tentang wisata maritim banyak berbicara mengenai wisata sebagai sebuah definisi dan konsep (Asy'ari et al., 2021) yaitu melihat *tourism* atau wisata sebagai aktivitas manusia yang berlangsung di luar lingkungan asalnya untuk tujuan berlibur, berdagang, atau kegiatan bisnis lainnya. Selain itu, kegiatan wisata dipandang sebagai mesin ekonomi yang banyak digunakan oleh negara dunia untuk pertukaran barang dan jasa melalui pertukaran barang lokasi wisata dan pengunjung melalui buah tangan, souvenir, dan lainnya (Ferdinan, Makmur and Ribawanto, 2015). Terdapat tujuh tahapan dalam pengembangan wisata maritim yaitu: eksplorasi, keterlibatan, pengembangan, konsolidasi, stagnasi, penurunan, dan perbaikan. Namun, adapula yang mengatakan jika pengembangan wisata maritim meliputi empat langkah yaitu: (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) penggerakan, (d) evaluasi dengan menitikberatkan pada partisipasi masyarakat, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder involvement*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, daya dukung, dan evaluasi.

Selain itu, wisata maritim juga berusaha menciptakan kemandirian dengan berupaya menjadikan masyarakat sebagai pelaku dan elemen penting dengan cara melibatkan mereka dalam pembangunan pariwisata sehingga mampu menggerakkan semua potensi terpendam dalam masyarakat. Tujuan akhirnya adalah untuk pembangunan dan pemeliharaan sumber daya. Potensi terpendam yang dimaksud adalah potensi alam, kuliner, kerajinan, dan kesenian daerah yang belum dikelola dengan baik, sehingga perlu diadakan sosialisasi, diskusi potensi wisata, kompetisi antar pengelola wisata, dan berbagai pelatihan yang dapat menunjang upgrading potensi wisata melalui pendekatan *community* untuk pada akhirnya mencapai kesejahteraan masyarakat berupa tujuh dampak seperti: (1) penerimaan devisa; (2) pendapatan masyarakat; (3) kesempatan kerja; (4) distribusi manfaat atau keuntungan; (5) kepemilikan dan kontrol ekonomi masyarakat; (6) pembangunan; dan (7) pendapatan pemerintah.

Pengembangan Wisata Maritim Berbasis *Community Based Tourism*

Pengembangan wisata dapat dikatakan telah memenuhi unsur *community based tourism* apabila masyarakat dilibatkan dalam pengembangan wisata maritim dan ikut merasakan dampak positif dari aktivitas wisata yang ada (Hermawan, 2016). Konsep *community based tourism* bermakna bahwa wisata harus berbasis masyarakat atau menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama sehingga kebermanfaatan wisata dapat diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat dengan menggerakkan komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sebagai mitra industri pariwisata, serta mengedepankan keberlanjutan, pemberdayaan, dan kemandirian (Giampiccoli and Kalis, 2012; Tang, 2019).

Terdapat 5 aspek dalam *community based tourism*, yakni : (1) Sosial aset yang dimiliki oleh masyarakat, seperti: budaya, adat-istiadat, jaringan sosial, dan gaya hidup; (2) Sarana dan prasarana, bagaimana sarana dan prasarana objek wisata tersebut apakah sudah ideal dalam rangka memenuhi kebutuhan wisatawan; (3) Organisasi, adakah organisasi masyarakat yang mampu menjalankan objek dan atraksi wisata secara mandiri; (4) Aktivitas ekonomi, bagaimana aktivitas ekonomi dalam rantai ekonomi pariwisata di masyarakat secara empiris berdampak pada pemerataan manfaat ekonomi di kalangan masyarakat lokal, ataukah manfaat tersebut masih dinikmati oleh kelompok tertentu; (5) Proses pembelajaran merupakan hal yang krusial bagi masyarakat dalam penciptaan produk dan atraksi wisata.

1. Sosial Aset dalam Wisata Maritim Pulau Dua

Sosial aset yang dimiliki oleh destinasi wisata Pulau Dua Kabupaten Aceh Selatan berupa budaya, adat-istiadat, jaringan sosial, dan gaya hidup, namun belum sepenuhnya dikembangkan oleh Pengelola Wisata. Selama ini, wisata Pulau Dua yang berbentuk wisata menuju pulau masih mengedepankan gaya hidup pecinta alam sehingga wisatawan yang datang berkunjung pada umumnya tertarik karena pesona alam yang ditawarkan seperti air laut yang jernih, pasir pantai yang putih, ikan-ikan yang berwarna warni dan suasana wisata privat yang diperoleh oleh wisatawan yang berkunjung. Ditambah rute menuju pulau yang cukup menantang dengan menggunakan perahu nelayan, meskipun hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat yaitu sekitar 5 menit perjalanan laut, pada umumnya wisatawan yang tidak terlalu memiliki gaya hidup pecinta alam akan membatalkan kedatangannya ke Pulau Dua. Berikut gambar nelayan yang digunakan untuk menyeberang ke Pulau Dua.

Meskipun saat ini, wisata Pulau Dua telah mengakomodir gaya hidup wisatawan pecinta alam yang ingin menikmati keindahan bawah laut dengan menyediakan alat snorkeling, namun alatnya masih sangat terbatas dan tidak menjadi menu utama dalam paket wisata yang ditawarkan. Selain itu, atraksi gaya hidup lainnya seperti diving, atraksi laut *banana boat* misalnya belum tersedia di lokasi wisata. Sedangkan aspek sosial aset yang lain seperti budaya dan adat istiadat belum ditambahkan dalam paket wisata Pulau Dua. Aspek budaya tersebut seperti penampilan seni tari atau atraksi budaya lainnya. Padahal, banyak tempat wisata lain seperti wisata di Pulau Bali atau Danau Toba sudah menawarkan atraksi budaya sebagai daya pikat tambahan bagi wisatawan.

Terkait aspek *social network*, Pengelola Wisata sampai saat ini masih terbatas pada hubungan dengan Pemerintah Aceh Selatan sebagai donator utama untuk pembangunan fasilitas wisata seperti pembangunan dermaga apung dan bangunan singgah di Pulau Dua. Pengelola Wisata belum membuka ruang komunikasi untuk bekerja sama (*network*) bersama Pemerintah Provinsi, Kementerian Pariwisata, atau pihak swasta lainnya. Salah satu faktor yang menghambat kerja sama tersebut adalah terkait kemampuan komunikasi yang terbatas mengingat Pengelola Wisata adalah nelayan dengan keterbatasan *networking* dalam bidang pariwisata. Selain itu, juga karena keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia, di mana untuk mengelola Pulau Dua yang memiliki luas 3 hektare, saat ini hanya ada dua pengelola, dan mereka mengurus hampir semua aspek wisata seperti pengawasan fasilitas wisata, keuangan, promosi, dan lainnya. Kondisi ini menyebabkan pengelola tidak lagi memiliki cukup waktu untuk membangun *networking*.

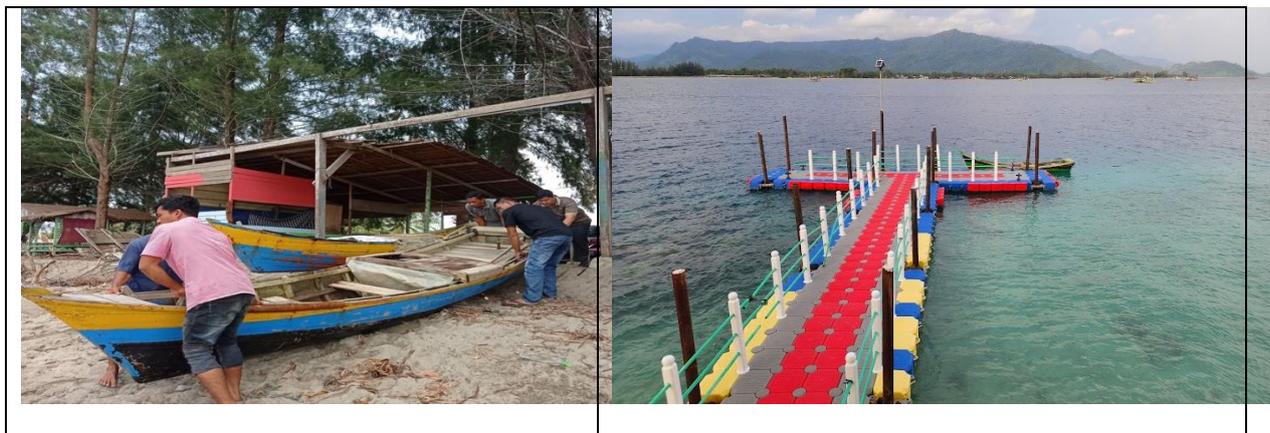
2. Sarana dan Prasarana Wisata Pulau Dua

Berdasarkan penelitian, sarana dan prasarana objek wisata maritim yang dimiliki oleh Pulau Dua Kabupaten Aceh Selatan belum maksimal tersedia untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Beberapa sarana dan prasarana penunjang tersebut seperti dermaga, kapal, toilet, mushala, kafe, jaket keselamatan, dan alat snorkeling. Berdasarkan wawancara dengan Harlizar, Keuchik (Kepala Desa) Ujong Pulo Rayeuk:

“Wisata Pulau Dua pertama kali dikembangkan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2019 dengan membangun jalan lingkar setapak, gazebo, toilet, dan lampu penerang pulau. Tapi tahun 2020 tidak ada pembangunan, di tahun 2021 ada pembangunan dermaga apung dan pondok pondok. Di tahun 2022 dan 2023 tidak ada pembangunan apapun. Kita sempat meminta bantuan perawatan dan renovasi fasilitas yang sudah ada.”

Sarana penunjang wisata di Pulau Dua mayoritas bersumber dari investasi Pemerintah Aceh Selatan dengan timbal balik berupa pembayaran PAD yang bersumber dari wisata sebesar Rp.5.000.000/tahun. Fasilitas yang telah dibangun oleh Pemerintah yang sangat membantu dalam pengembangan wisata adalah dermaga apung di sisi Pulau Dua dengan anggaran mencapai 1.4 M. Namun, pengelola mengeluhkan kondisi sisi pantai lainnya yang tidak memiliki dermaga sehingga penumpang yang akan bergerak ke Pulau Dua tidak seluruhnya dapat diangkat karena kesulitan dalam mengkondisikan kapal. Sebagai informasi, hingga saat ini tidak ada kapal yang secara khusus dapat digunakan untuk membawa wisatawan menuju Pulau Dua, akibatnya wisata Pulau Dua masih sangat mengandalkan kapal-kapal nelayan yang tertambat di sepanjang pantai yang tidak digunakan oleh nelayan untuk melaut mencari ikan. Kondisi ini mengakibatkan sebuah kondisi “ketidakpastian” bagi wisatawan yang datang berkunjung, ketidakpastian dari sisi ketersediaan kapal maupun ketidakpastian jadwal keberangkatan menuju Pulau Dua.

Pengelola Wisata saat ini menggunakan kapal nelayan dengan biaya Rp.50.000/orang dengan kapasitas angkut minimal lima orang penumpang. Kondisi ini mungkin terlihat ideal bagi pengelola, namun tidak ideal bagi wisatawan yang datang berkunjung ke lokasi di hari atau jam sepi pengunjung karena jika tidak mencukupi jumlah minimal maka tidak ada nelayan yang bersedia mengangkut penumpang. Kondisi tersebut (batas minimal penumpang) bukan tanpa alasan, nelayan kesulitan untuk mengkondisikan kapal mereka jika hanya sendirian dan memerlukan bantuan minimal 4 nelayan lain untuk membantu mendorong kapal ke pinggir laut karena tidak tersedia dermaga di sisi kedatangan. Hal tersebut menyebabkan *cost* atau biaya pengoperasionalan kapal menjadi mahal dan Pengelola Wisata tidak ingin membebankan hal tersebut kepada pengunjung sehingga mereka menetapkan batas minimal penumpang. Berikut Gambar.1 dermaga apung dan kondisi pantai tanpa dermaga tempat kapal tertambat.



Gambar 1.
Situasi Sarana Dermaga di Wisata Pulau Dua
Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

Sarana dan prasarana lain seperti toilet, jaket keselamatan, dan alat snorkeling telah tersedia di lokasi wisata. Namun, sampai saat ini fasilitas berupa mushala dan kafe belum tersedia di Pulau Dua. Sehingga, bagi pengunjung yang ingin mengunjungi Pulau Dua disarankan untuk membawa bekal makanan sendiri atau terlebih dahulu makan di warung-warung kecil sebelum keberangkatan menuju Pulau Dua. Sedangkan, gazebo dan jalan setapak yang ada di lokasi kondisinya saat ini tidak cukup terawat karena keterbatasan dana yang dimiliki Gampong (Desa) Ujong Pulo Rayeuk. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana belum cukup ideal dalam rangka memenuhi kebutuhan wisatawan. Sehingga, perlu adanya peningkatan dalam pembangunan sarana pendukung wisata seperti mushala, penerangan, sanitasi, dan alat-alat khusus atraksi wisatawan, serta sarana kebersihan agar lingkungan yang masih asri di Pulau Dua dapat tetap sama-sama dijaga oleh pengelola, pemerintah, dan wisatawan.

3. Organisasi dalam Pengelolaan Pulau Dua

Dalam pengembangan wisata Pulau Dua, belum ada organisasi yang dibentuk secara profesional seperti yang dilakukan di banyak tempat wisata lainnya yang memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau Lembaga Pengelola Wisata yang memiliki hierarki dan struktur kepengurusan yang jelas. Di wisata Pulau Dua, hanya terdapat dua orang pengelola wisata yaitu M. Yaqub yang mengurus operasional, perawatan fasilitas, dan keuangan. Sedangkan, Miaty mengurusi promosi Pulau Dua di media sosial seperti Instagram (IG) dan Facebook (FB). Selain juga promosi yang dilaksanakan dengan pelbagai pemberitaan di media massa dan media televisi. Gambar.2 berikut memperlihatkan bagaimana promosi dijalankan oleh pengelola wisata.



Gambar 2.

Promosi Wisata Melalui Media Digital Instagram
Sumber: pulaudua_resort (IG)

Apabila melihat dari bentuk kepengurusan, tentu saja hal ini menunjukkan jika wisata Pulau Dua belum memiliki organisasi yang baku dan masih terbatas dari segi sumber daya manusia. Terbatasnya jumlah pengelola wisata tidak lepas dari keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh wisata Pulau Dua, mengingat beberapa tahun terakhir terjadi penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan sehingga skema bagi hasil: pemerintah, pengelola, dan masyarakat tidak cukup mampu menggaji Pengelola Wisata secara layak. Sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi masyarakat wisata Pulau Dua belum mampu secara mandiri mengembangkan wisata berbasis *community based tourism* dan masih bergantung pada Pemerintah Aceh Selatan. Bahkan, ketika peneliti memberikan ide untuk melakukan pendekatan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Kementerian, atau swasta mereka tidak begitu menyambut ide tersebut. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu, pengetahuan, dan anggaran bagi mereka untuk membuka komunikasi dengan para stakeholder di bidang wisata.

Hal tersebut disebabkan oleh kondisi pengelola yang berasal dari keluarga nelayan atau bekerja sebagai nelayan sehingga mereka memiliki keterbatasan waktu untuk fokus dalam pengembangan wisata maritim. Terlebih mayoritas di antara mereka adalah nelayan dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah yang biaya untuk makan setiap harinya bersumber dari pekerjaan dalam mencari ikan ke laut, sehingga apabila terlalu mencurahkan perhatian kepada wisata maritim ini mereka akan kehilangan sumber penghasilan utama sebagai nelayan demi penghasilan tambahan sebagai pengelola wisata.

4. Aktivitas Ekonomi di Wisata Pulau Dua

Sektor pariwisata Pulau Dua berperan penting dalam ekonomi masyarakat karena aktivitas ekonomi yang berlangsung di wisata Pulau Dua menjadi rantai ekonomi bagi masyarakat diantaranya melalui sumber penerimaan negara melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong ekonomi daerah, mengurangi jumlah pengangguran, dan meningkatkan produktivitas daerah. Secara empiris, wisata maritim di Pulau Dua bisa memicu *distribution economic benefit* di antara masyarakat setempat misalnya, selain mendapatkan uang masuk melalui penyewaan kapal, jasa dorong kapal, dan sewa alat snorkeling, warung makan dan toko di sekitar kawasan wisata mendapatkan pemasukan yang cukup besar ketika banyak wisatawan datang. Biaya yang harus dikeluarkan oleh wisatawan yang mengunjungi Pulau Dua minimal adalah Rp.50.000/orang untuk biaya penyewaan kapal penyeberangan. M. Yaqub, salah satu Pengelola Wisata mengatakan: "Manfaat wisata Pulau Dua ini sangat besar bagi masyarakat karena mayoritas kita ini adalah nelayan. Jadi jika tidak melaut, nelayan bisa mendapatkan uang tambahan dengan membawa wisatawan ke Pulau Dua."

Meskipun didukung oleh mayoritas masyarakat desa karena dianggap mampu menimbulkan *trickle down effect* ekonomi. Namun, upaya pengembangan yang didukung oleh desa melalui pengusulan anggaran ketika Musrembang Desa untuk perbaikan fasilitas wisata Pulau Dua hingga saat ini belum disetujui oleh pemerintah Aceh Selatan dengan alasan kekhawatiran pendanaan tersebut akan tumpang tindih dengan usulan anggaran yang direncanakan oleh pemerintah Aceh Selatan. Menurut Pemerintah Aceh Selatan, pengembangan destinasi wisata Pulau Dua bertujuan selain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya menjadikan wisata Pulau Dua sebagai destinasi unggulan dengan membangun dermaga dan gazebo atau rumah tinggal bagi wisatawan yang bermalam di Pulau Dua. Meskipun demikian, Kepala Dinas Pariwisata yaitu Muchsin (2023) mengatakan jika pemerintah menyadari jika pengembangan wisata Pulau Dua membutuhkan anggaran yang besar terutama untuk membangun sarana dan prasarana. Namun, pemerintah melihat langkah pengembangan ini sebagai bagian untuk menciptakan masyarakat mandiri serta mampu mengelola potensi wisata dengan baik.

Padaحال, pengembangan wisata Pulau Dua, diharapkan oleh Pemerintah Aceh Selatan, untuk tetap melibatkan masyarakat atau *community based tourism*. Tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja bagi nelayan lokal yang kurang mampu secara ekonomi, memberikan pengetahuan terkait pariwisata, dan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. Sehingga, akan hadir masyarakat lokal yang sesuai prinsip *community based tourism* yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata. Selain juga melakukan kegiatan pemantauan secara terbatas, dan yang terakhir mendorong agar pengembangan dapat terlaksana.

5. Proses Pembelajaran dalam Wisata Pulau Dua

Berwisata di Pulau Dua memberikan banyak pengetahuan baru tentang alam, konservasi, dan perlindungan lingkungan. Wisata Pulau Dua memiliki alam yang indah dan terletak di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan sehingga dapat menjadi media pembelajaran bagi wisatawan yang datang untuk mencintai alam yang sudah diberikan Tuhan. Salah satunya adalah suasana setiap petang di mana ada banyak Burung Perlin yang terbang berkelompok. Alwi, salah satu masyarakat Desa Ujong Pulo Rayeuk "Setiap menjelang senja atau matahari terbenam, akan ada sekelompok Burung Perlin terbang bersama dalam jumlah yang banyak pulang ke Pulau Dua." Gambar 3. Pulau Dua Aceh Selatan.



Gambar 3.
Pulau Dua Aceh Selatan
Sumber: popularitas.com (2023)

Pembelajaran dapat diambil dalam proses wisata Pulau Dua adalah pengetahuan tentang pentingnya konservasi alam, ekosistem maritim, dan biota laut. Wisatawan yang datang berkunjung selain dapat mengurangi stress dari rutinitas harian seperti stress pekerjaan, tugas yang menumpuk, juga dapat mempelajari bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui interaksi langsung wisatawan dengan alam Pulau Dua. Berwisata di Pulau Dua juga mendukung kegiatan pendidikan terkait kemaritiman bahkan sejak usia dini dengan slogan: “aku cinta laut sejak kecil” karena wisata ini juga dapat dikunjungi oleh anak-anak dan tidak hanya orang dewasa saja. Wisata alam ke Pulau Dua dapat menjadi kegiatan perjalanan guna menikmati keunikan dan keindahan alam di wilayah wisata sekaligus mendapatkan edukasi di dalamnya. Belajar melalui alam bermanfaat untuk: (1) menghargai makhluk hidup di sekitarnya; (2) meningkatkan kreativitas; dan (3) mampu melatih motorik karena mengandalkan kemampuan fisik seperti berjalan jauh dan berlari.

Kegiatan wisata berbasis maritim di Pulau Dua mampu meningkatkan *awareness* wisatawan tentang potensi pencemaran alam, perusakan lingkungan, dan potensi ancaman terhadap kelestarian lingkungan. Setiap pengunjung wisata yang datang dapat semakin teredukasi dengan misi penyelamatan lingkungan sekaligus dapat mendapatkan kesempatan rekreasi berbasis alam yang murah dan sarat ilmu. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak rombongan wisatawan dari instansi pendidikan seperti mahasiswa dan pelajar datang untuk belajar sekaligus berwisata di Pulau Dua. Pada tahun 2022, wisata Pulau Dua masuk nominasi 10 besar dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Implementasi pengembangan wisata berdasarkan *community based tourism* di Wisata Pulau Dua Kabupaten Aceh Selatan belum maksimal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Komunitas Wisata Pulau Dua. Dari lima aspek dalam *community based tourism*, yaitu: (1) aset social; (2) sarana dan prasarana; (3) organisasi; (4) aktivitas ekonomi; dan (5) proses pembelajaran, hanya aspek aktivitas ekonomi dan proses pembelajaran yang sudah baik diimplementasikan di lokasi wisata. Sedangkan aset sosial, sarana dan prasarana, dan organisasi belum diimplementasikan secara maksimal. Beberapa alasan keterbatasan implementasi *community based tourism* karena terbatasnya dukungan mitra kerja sama dan investor, serta keterbatasan anggaran dalam pengelolaan wisata Pulau Dua. Implikasi yang timbul dari situasi ini adalah perlu segera pembenahan yaitu: (1) penambahan sarana dan prasarana seperti fasilitas dermaga dan papan penunjuk; (2) sumber daya manusia melalui pembentukan organisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan (3) peningkatan anggaran operasional melalui kerja sama dengan pemerintah dan swasta, sehingga dapat meningkatkan besaran anggaran untuk pengelolaan wisata. Penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang telah ada adalah tentang tata Kelola wisata maritim berbasis pentahelix berupa kolaborasi yang melibatkan lima unsur stakeholder pariwisata, yaitu: akademisi, bisnis (pengusaha), komunitas, pemerintah, dan media.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Universitas Teuku Umar yang telah mendukung dan mendanai penelitian ini melalui skema Penelitian Lektor (PL) dengan Nomor Kontrak: 110/UN59.7/SPK-PPK/2023.

REFERENSI

- Agus, M. H. S. (2023) Kunjungan Wisatawan ke Aceh Selatan Capai 25 Ribuan Orang, Antara News. Available at: [https://aceh.antaranews.com/berita/339036/kunjungan-wisatawan-ke-aceh-selatan-capai-25-ribuan-orang#:~:text=Banda Aceh %28ANTARA%29 - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Januari hingga Juni 2023 mencapai 25 ribuan orang.](https://aceh.antaranews.com/berita/339036/kunjungan-wisatawan-ke-aceh-selatan-capai-25-ribuan-orang#:~:text=Banda Aceh%28ANTARA%29 - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Januari hingga Juni 2023 mencapai 25 ribuan orang. (Accessed: 9 July 2023).) (Accessed: 9 July 2023).
- Aji, R. R. D. (2018) 'Kontribusi Sector Pariwisata Terhadap Ekonomi Wilayah di Provinsi Jawa Timur', *Jurnal planoeearth*, 3(2), pp. 57-62.
- Anismar, Satria, D. and Ali, M. (2018) 'Religious Tourism: Concept of Community-Based Tourism in Aceh Singkil, Indonesia', in *Proceedings of MICoMS 2017 (Emerald Reach Proceedings Series, Vol. 1)*. Bingley: Emerald Publishing Limited, pp. 283-288. doi: 10.1108/978-1-78756-793-1-00086.
- Asy'ari, R. et al. (2021) 'Kajian Konsep Ekowisata Berbasis Masyarakat Dalam Menunjang Pengembangan Pariwisata : Sebuah Studi Literatur', *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 6(1), p. 9. doi: 10.25078/pba.v6i1.1969.
- Cresswell, J. W. (2014) 'Research Design', in *Research Design*. Pustaka Pelajar, p. 19.
- Ferdinan, Y., Makmur, M. and Ribawanto, H. (2015) 'Pengembangan Wisata Alam Berbasis Ekowisata dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi Pada Disparbud Kabupaten Nganjuk)', *Jurnal Administrasi Publik*, 3(12), pp. 2123-2127.
- Giampiccoli, A. and Kalis, J. H. (2012) 'Community-Based Tourism and Local Culture: the Case of the AmaMpondo"', *PASOS: Revista de Tourism y Patrimonio Cultural*, 10(1), pp. 173-188.
- Haryanto, J. T. (2014) 'Model Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi Diy', *Jurnal Kawistara*, 4(3). doi: 10.22146/kawistara.6383.

- Hendrita, V. (2017) 'Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tanah Datar', *Agrifo : Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 2(2), p. 73. doi: 10.29103/ag.v2i2.379.
- Ihsan, I., Mubarak, A. and Mulyadin, M. (2021) 'Penataan Potensi Ekowisata Mangrove Pantai Lariti Untuk Meningkatkan Sektor Ekonomi Masyarakat Desa Soro Kec. Lambu Kab. Bima.', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1). doi: 10.36312/jisip.v5i1.1679.
- Junaid, I. (2020) 'Implementasi Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur', *Jurnal Pariwisata Terapan*, 3(2), p. 110. doi: 10.22146/jpt.46518.
- Lugra, W. et al. (2016) 'Peluang Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Ditinjau Dari Aspek Karakteristik Dan Gejala Perubahan Garis Pantai', *Jurnal Geologi Kelautan*, 1(2). doi: 10.32693/jgk.1.2.2003.94.
- Marjulita, M. A. J. I. (2019) 'Pengelolaan Objek Wisata Aceh Jaya: Harapan dan Kenyataan Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat', *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 5(1), pp. 85-93.
- Meutia, R. and Rizal, S. (2022) 'Pengaruh Pengembangan Wisata Bahari terhadap Pendapatan Masyarakat di Pulau Dua Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan', *JIBES: Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), pp. 10-22.
- Mulyana, E. (2019) 'Upaya Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Masyarakat Melalui Pengembangan Bisnis Ekowisata', *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 1(1), pp. 38-43. doi: 10.35899/biej.v1i1.12.
- Pertiwi, N. L. G. A. (2013) 'Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata Dan PHR Terhadap PAD Kabupaten Gianyar', *Jurnal EP Unud*, 3(3), pp. 115-123.
- Pradikta, A. (2013) 'Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati', *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), pp. 246-256.
- Pynanjung, P. A. (2018) 'Dampak Pengembangan Ekowisata terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bengkayang', *Jurnal Nasional Pariwisata*, 10(1), p. 22. doi: 10.22146/jnp.59469.
- Suot, C. G., Kawung, G. M. V. and Tumilaar, R. (2021) 'Pengaruh Sektor Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado', *Jurnal EMBA*, 9(1), pp. 403-411.
- Tang, S. (2019) 'Capacity Building of Community-based Ecotourism in Developing Nations: A Case of Mei Zhou, China'. doi: 10.2991/bems-19.2019.105.
- Wibawanti, L. R. (2020) Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Wisata Bahasa Di Dusun Pakel Karanganyar. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yanti, N. and Hadya, R. (2018) 'Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan PAD Kota Padang', *Jurnal Benefita*, 3(3), pp. 370-379.
- Yatmaja, P. T. (2019) 'Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan', *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(1), pp. 27-36. doi: 10.23960/administratio.v10i1.93.
- Yulianti et al., D. (2019) 'Peranan Masyarakat Lokal Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Provinsi Lampung', Naskah Publikasi. Universitas Lampung.